

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun 2018. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang seperti yang tertuang

dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2015-2018. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018 yaitu **“Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”**.

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah : Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi 'Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi – kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013 – 2018, yakni: **BERSih**, **Makmur**, **Adil**, **Religius** – toleran, **Terkemuka**, **Aman**, **Berbudaya**, **Asri**, dan **Terdidik**.

Masing-masing akronim dari BERMARTABAT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bersih : Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan yang bersih (*clean governance*) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

2. Makmur : Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 - 2018.
3. Adil : Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah.
4. Religius-toleran : Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.
5. Terkemuka : Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.
6. Aman : Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas

masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan.

7. Berbudaya : Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.
8. Asri : Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.
9. Terdidik : Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud kegiatan penyusunan Perubahan Renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2018.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Perubahan Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang adalah;

1. Mengevaluasi terhadap program - program dan kegiatan - kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun berikutnya ;
2. Mengumpulkan rancangan / usulan program - program dan kegiatan - kegiatan dari unit - unit dalam lingkup kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang ;
3. Memilih, memilah dan menelaah rancangan / usulan program - program dan kegiatan - kegiatan dan disusun berdasarkan skala prioritas ;
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD Perubahan tahun 2018 bagi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kota Malang

5. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, hasil evaluasi tahun berkenaan sehingga di butuhkan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
- 1.2. Landasan Hukum : Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat triwulan II Tahun 2018

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II (pada Rancangan Perubahan Renja sampai bulan Mei 2018 dan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja sampai bulan Juni 2018).

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II (sesuai dengan format E.81). Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu mereview capaian Renja membandingkan dengan hasil analisis kebutuhan penambahan anggaran
2. Penjelasan mengenai alasan proses penambahan anggaran dilakukan
3. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah (dituliskan pada catatan penting)
4. Lampiran tabel berikut, Tabel 2.2

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II Tahun 2018

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II (pada Rancangan Perubahan Renja sampai bulan Mei 2018 dan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja sampai bulan Juni 2018).

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II (sesuai dengan format E.81). Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Realisasi pelaksanaan APBD hingga triwulan II (30 Juni) anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018 sebesar Rp. 2.396.299.025,00 Secara ringkas realisasi pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2018 hingga triwulan II ditunjukkan pada tabel Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang.

1. Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

Adapun program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada Renja yang direncanakan sampai dengan Triwulan II adalah :

a. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

1) Kegiatan Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana

Kegiatan ini baru dapat terealisasi 1 kali rapat lapdal dari target pada renja 1 dokumen RPB sehingga baru tercapai 30%.

2) Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana

Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di tribulan III.

b. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

1) Pelatihan dan simulasi darurat bencana

Kegiatan ini baru dapat terealisasi 6 kali dari target pada renja 7 kali sehingga baru tercapai 86%.

c. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana

1) Rekontruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana

Kegiatan ini baru dapat terealisasi 4 pekerjaan fisik dari target pada renja 6 pekerjaan fisik sehingga baru tercapai 66%.

2) Pemulihan social ekonomi budaya dan psikologis pascabencana

Kegiatan ini masih dalam tahap pengumpulan data, Kegiatan Pemulihan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Psikologis Masyarakat Pasca Bencana selanjutnya akan dijadikan dasar Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Berbasis Masyarakat Tahun 2018.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

kegiatan pengadaan kendaraan dinas /operasional di PAK.

2) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor

Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor sudah dilaksanakan dan masih dalam proses pengerjaan.

3) Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana

Kegiatan ini baru dapat terealisasi 9 jenis barang modal dari target pada renja 5 jenis bahan perlengkapan/praktek, 1 paket sewa tempat, 4 jenis pakaian kerja, 19 jenis barang modal sehingga baru tercapai 31%.

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Peningkatan / Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di tribulan III.

f. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1) Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan belum dapat terealisasi dan menunggu jadwal dari organisasi.

2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan;

a. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

1) Kegiatan Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana

Tidak tercapainya kegiatan Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana masih dalam tahap pengumpulan data.

2) Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana

Tidak tercapainya kegiatan Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana disebabkan karena jadwal waktu yang telah ditetapkan bersamaan dengan pemilukada dan dalam masa kampanye. Kegiatan tersebut melibatkan TNI POLRI, dunia usaha, PHRI, SPBU dan UMKM serta pemerintah Kota Malang.

b. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

1) Pelatihan dan simulasi darurat bencana

Tidak tercapainya kegiatan Pelatihan dan simulasi darurat bencana disebabkan karena 6 spj belum di proses.

c. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana

1) Rekontruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana

Tidak tercapainya kegiatan Rekontruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana disebabkan karena 2 lokasi yang lain telah di kerjakan oleh masyarakat.

2) Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana

Tidak tercapainya kegiatan pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana disebabkan karena masih dalam tahap pengumpulan data.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tidak tercapainya kegiatan pengadaan kendaraan dinas /operasional disebabkan karena di PAK.

2) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor

Tidak tercapainya Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor disebabkan karena masih dalam proses pengerjaan dan sudah dilaksanakan.

3) Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana

Tidak tercapainya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan Gedung kantor disebabkan karena belum adanya penyedia dan untuk 4 jenis pakaian kerja di PAK.

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Peningkatan / Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tidak tercapainya kegiatan Peningkatan / Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur disebabkan karena menunggu penyedia jasa sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

f. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1) Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota

Tidak tercapainya Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan disebabkan karena menunggu jadwal dari bagian organisasi.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – factor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah, maka pada Perubahan Renja tahun 2018 perlu dilakukan:

- 1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak perlu koordinasi intensif dengan OPD terkait sehubungan dengan Rehabilitasi dan Rekontruksi.
- 2) Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.
- 3) Dalam penyusunan jadwal kegiatan perlu di perhatikan faktor eksternal.

		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			2 unit mobil dan 4 unit motor	131,385,400	9 unit	209,490,000	100%	48,690,000	100%	8,559,600						57,249,600	27.33%						
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			1 kali	4,309,000	13 jenis	43,238,000	-	-	-	-						-	0.00%						
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana			27 jenis barang modal, 11 jenis pakaian kerja, & 8 jenis bahan/material	599,186,020	5 jenis bahan perlengkapan / praktek, 1 paket sewa tempat, 4 jenis pakaian kerja, 19 jenis barang modal	919,125,000	-	-	9 jenis barang modal	100,630,000						100,630,000	31%	10.95%					
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	40%	16.05%			0%	0%		
		Predikat kinerja																	rendah	sangat rendah						
6.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur - unsur penanggulangan bencana	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik				89,916,950	100%	390,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Peningkatan / Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1 kali	89,916,950	2 kali	390,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%						
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	0%	0%			0%	0%		
		Predikat kinerja																								
7.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur - unsur	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD				368,931,000	76%	409,500,000	-	27,197,000	-	88,192,000	-	-	-	-	-	115,389,000	28.18%					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			7 dokumen	59,600,000	8 jenis dokumen	66,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	24,240,000					4 Dokumen	29,240,000	50%	44.30%					

penanggulangan bencana	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan		2 jenis dokumen	79,400,000	2 jenis dokumen	102,500,000	-	15,242,000	1 Dokumen	29,879,000				1 Dokumen	45,121,000	50%	44.02%							
	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra yang disusun/direviu				1 draft Renstra	75,000,000	-	-	-	-				-	-	0%	0.00%							
	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	jumlah NA dan Ranperda/Ranperwal		1 kajian	181,500,000	1 dokumen perwal	55,000,000	-	-	-	-				-	-	0%	0.00%							
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah		1 dokumen IKM dan 1 dokumen SPIP	48,431,000	12 bulan	111,000,000	3 bulan	6,955,000	3 bulan	34,073,000				6 bulan	41,028,000	50%	36.96%							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25%	28.18%			0%	0%			
Predikat kinerja																	sangat rendah	sangat rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							8,075,000,000		408,326,596		1,987,972,429														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	22%	28.07%							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	rendah	rendah							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan bencana di wilayah Kota Malang; Tingginya antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD.																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Terbatasnya sumber daya manusia di BPBD; Belum maksimalnya koordinasi antar pelaku dalam penanggulangan bencana; Belum maksimalnya penyampaian informasi terkait program kerja BPBD kepada masyarakat.																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana dan melakukan reschedule kegiatan; Memaksimalkan penyampaian informasi terkait program kerja BPBD kepada masyarakat secara formal maupun informal.																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Melakukan evaluasi internal dan memaksimalkan sinkronisasi serta harmonisasi antar Renja SKPD.																									

yang tidak perlu

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

Didalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan BPBD Kota Malang, BPBD melaksanakan tugas-tugas Penanggulangan Bencana dan tugas-tugas Pemerintah sesuai Peran dan Fungsi Instansi Teknis dibidang Kebencanaan. Adapun analisa kebutuhan anggaran disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2

ANALISA KEBUTUHAN PERUBAHAN ANGGARAN

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Belanja Langsung				8,075,000,000.00	2,396,299,025.00	Belanja Langsung			8,075,000,000.00		
	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya				4,904,052,000.00	1,731,428,600.00	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			5,403,876,790.00		
	Penanggulangan Bencana Daerah				4,904,052,000.00	1,731,428,600.00	Penanggulangan Bencana Daerah			5,403,876,790.00		
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				1,580,655,000.00	473,601,000.00	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana			1,381,850,000.00		
		Persentase masyarakat tangguh bencana	5%		-	-		Persentase masyarakat tangguh bencana	5%			
	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	1 dokumen	1 kali rapat lapdal	130,625,000.00	1,600,000.00	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	1 dokumen	130,625,000.00	-	
	Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi/pawai pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	2 kali	-	95,985,000.00	1,658,000.00	Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi/pawai pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	2 kali	97,535,000.00	Penambahan honor dan belanja perangko	
	Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	60 kali	24 kegiatan meliputi 443 titik	154,580,000.00	35,826,000.00	Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	60 kali	147,255,000.00	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR	
	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah pelaksanaan sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	2 kali	-	128,855,000.00	2,105,000.00	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah pelaksanaan sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	2 kali	124,875,000.00	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR	
	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	5 Kelurahan	10 kegiatan pelatihan kelurahan dan komunitas di 2 kelurahan	1,070,610,000.00	432,412,000.00	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	5 Kelurahan	881,560,000.00	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR	
2	Program Kedaruratan dan Logistik				1,747,020,000.00	267,815,000.00	Program Kedaruratan dan Logistik			1,650,381,000.00		

Penanggulangan Bencana					-	Penanggulangan Bencana					
	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%			-		Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%			
Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah diklat penanggulangan bencana bagi TRC / Relawan yang dilaksanakan	7 kali	6 kali	403.955.000.0	30.650.000.0	Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah diklat penanggulangan bencana bagi TRC / Relawan yang dilaksanakan	7 kali	394.855.000.00	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR	
	Jumlah diklat penanggulangan bencana bagi TRC / Relawan yang dilaksanakan	7 kali	-				Jumlah diklat penanggulangan bencana bagi TRC / Relawan yang dilaksanakan	7 kali	-	-	
Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	17 orang TRC, 8 orang operator Pusdalops, 4 orang TRC Kaji Cepat	18 orang TRC, 7 orang operator pusdalops, 3 orang TRC Kaji Cepat, 1 orang Supervisor Pusdalops	698.930.000.0	223.555.000.00	Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	17 orang TRC, 8 orang operator Pusdalops, 4 orang TRC Kaji Cepat	697.310.000.00	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR	
Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	2 jenis	-	40.790.000.0	-	Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	2 jenis	115.206.000.00	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR	
Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah pelaksanaan latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	1 kali	1 kali	75.000.000.0	10.080.000.00	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah pelaksanaan latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	1 kali	75.000.000.00	-	
Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	1 paket bahan bangunan, 150 paket sembako, 85 paket family kit, 1 paket sparepart peralatan, 1 paket pemeliharaan peralatan kebencanaan, 2 jenis belanja modal		359.915.000.0	3.530.000.0	Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	1 paket bahan bangunan, 150 paket sembako, 85 paket family kit, 1 paket sparepart peralatan, 1 paket pemeliharaan peralatan kebencanaan, 2 jenis belanja modal	199.580.000.00	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR	
Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	1 paket pemulihan jaringan sarana prasarana dalam darurat bencana	-	168.430.000.0	-	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	1 paket pemulihan jaringan sarana prasarana dalam darurat bencana	168.430.000.00	-	

3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana				1,576,377,000.00	990,012,600.00	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			2,371,645,790.00		
		Persentase terjaminnya kualitas hidup masyarakat pascabencana	100%		-	-		Persentase terjaminnya kualitas hidup masyarakat pascabencana	100%			
	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	1 dokumen	-	150,000,000.00	88,561,000.00	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	1 dokumen	150,000,000.00		pengurangan belanja banner kegiatan dan belanja perjalanan dinas
	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	4 pekerjaan fisik	4 pekerjaan fisik	343,758,000.00	332,279,500.00	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	4 pekerjaan fisik	444,608,000.00		Penambahan Anggaran untuk rehabilitasi sarana prasarana fisik, honor PNS dan Honor Tenaga Ahli, Juru Gambar dan Surveyor
	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	6 pekerjaan fisik	4 pekerjaan fisik	826,224,000.00	548,207,000.00	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	6 pekerjaan fisik	1,520,642,790.00		Penambahan Anggaran untuk rekonstruksi sarana prasarana fisik, Honor PNS dan Honor Tenaga Ahli, Juru Gambar dan Surveyor
	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi budaya dan psikologis yang disusun	1 dokumen	-	115,000,000.00	3,820,000.00	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi budaya dan psikologis yang disusun	1 dokumen	115,000,000.00		-
	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	35 KK	-	141,395,000.00	17,145,100.00	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	35 KK	141,395,000.00		-

	Urusan Umum			3,170,948,000.00	664,870,425.00	Urusan Umum			2,671,123,210.00		
	Umum			3,170,948,000.00	664,870,425.00	Umum			2,671,123,210.00		
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			600,845,000.00	265,228,265.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			602,203,200.00		
		Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	-	-		Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	-	-	
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	1300 surat	681 surat	52,501,000.00	22,512,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	1300 surat	52,501,000.00	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik	12 bulan	5 bulan	73,000,000.00	21,070,495.00	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik	12 bulan	74,796,200.00	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2	100 m2	61,500,000.00	31,182,000.00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2	61,182,000.00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	8 Jenis	4,000,000.00	3,920,000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	3,920,000.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	2 Jenis	4,000,000.00	1,446,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	3,960,000.00	
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	750 kotak	435 Kotak	43,500,000.00	8,959,000.00	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	750 kotak	43,500,000.00	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 kali	35 kali	306,144,000.00	151,138,270.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 kali	306,144,000.00	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang	2 Orang	56,200,000.00	25,000,000.00	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang	56,200,000.00	
		Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran	0	-	-	-		Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran	0	-	
		Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi	0	-	-	-		Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi	0	-	
		Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP	0	-	-	-		Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP	0	-	
		Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik	0	-	-	-		Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik	0	-	

		Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang	0	-	-		Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang	0	-	
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	-	-		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	-	
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1,770,603,000.00	284,253,160.00	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1,430,600,010.00	
		Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik	0	-	-		Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik	0	-	
		Persentase kendaraan dinas yang laik jalan	0	-	-		Persentase kendaraan dinas yang laik jalan	0	-	
		Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	0	-	-		Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	0	-	
		Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%	-	-		Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%	-	
	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun	1 bangunan	1 bangunan	268.750.000.00	74.985.000.00	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun	1 bangunan	78.695.000.00
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	1 unit sepeda motor trail	-	47.000.000.00	-	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	3 unit sepeda motor	69.350.000.00
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	21 jenis	11 jenis	75.000.000.00	49.938.560.00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	21 jenis	63.338.560.00
	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	5 jenis	5 jenis	84.150.000.00	1.450.000.00	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	5 jenis	65.836.360.00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	-	123.850.000.00	-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	152.500.000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	-	209.490.000.00	57.249.000.00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	209.490.000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	13 jenis	-	43.238.000.00	-	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	13 jenis	41.500.000.00

6	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	5 jenis bahan perlengkapan/praktek, 1 paket sewa tempat, 4 jenis pakaian kerja, 19 jenis barang modal	9 jenis barang modal	919,125,000.00	100,630,000.00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	5 jenis bahan perlengkapan/praktek, 1 paket sewa tempat, 19 jenis barang modal	749,890,090.00			
		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	0		-	-		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	0	-			
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0		-	-		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	-			
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			390,000,000.00	-	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			248,300,000.00			
		Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	100%		-	-		Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	100%				
		Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 kali	-	390,000,000.00	-	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 kali	248,300,000.00		
		Persentase kegiatan korsik yang difasilitasi	0		-	-		Persentase kegiatan korsik yang difasilitasi	0				
		Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan	0		-	-		Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan	0				
		Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	0		-	-		Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	0				
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0		-	-		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0				
7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				409,500,000.00	115,389,000.00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			390,020,000.00			
		Hasil evaluasi SAKIP SKPD	76		-	-		Hasil evaluasi SAKIP SKPD	76				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 jenis dokumen	4 jenis dokumen	66,000,000.00	29,240,000.00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 jenis dokumen	61,620,000.00	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang		

Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	2 jenis dokumen	1 jenis dokumen	102,500,000.00	45,121,000.00	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	2 jenis dokumen	105,900,000.00	Perubahan SBPU tentang Honor bendaharan barang	
Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra yang disusun/direviu	1 draft Renstra	-	75,000,000.00	-	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra yang disusun/direviu	1 draft Renstra	75,000,000.00	-	
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	jumlah NA dan Ranperda/Ranperwal	1 dokumen perwal	-	55,000,000.00	-	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	jumlah NA dan Ranperda/Ranperwal	1 dokumen perwal	47,500,000.00	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah	12 bulan	6 bulan	111,000,000.00	41,028,000.00	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah	12 bulan	100,000,000.00	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang	
	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	0		-	-		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	0			
	Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	0		-	-		Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	0			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab Perangkat Daerah.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumberdaya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah yang berwawaskan Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Selain itu pola perencanaan pembangunan tentunya harus menyeimbangkan peran antara perempuan dan laki-laki, oleh karena itu kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Secara rinci rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2018

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2018	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2018	PLAFON ANGGARAN (Rp)			STATUS (TETAP/ PERUBAHAN/ BARU)	Lokasi	KETERANGAN	
				9	10	11	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				4				Belanja Langsung			8,075,000.00	8,075,000.00	-				
				4				Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			4,904,052.00	5,403,876.79	499,000.00				
				4	5			Penanggulangan Bencana Daerah			4,904,052.00	5,403,876.79	499,000.00				
								Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana			1,580,655.00	1,381,850.00	(198,805,000.00)				
Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	"Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang " "Persentase menurunnya kejadian bencana " Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan untuk menjadi kelurahan tangguh Jumlah bencana tahun (x) dikurang jumlah bencana tahun (x - 1) dibagi jumlah bencana tahun (x - 1) dikali 100% IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	5 kelurahan 5% 76%	4	5	1	15										
				4	5	1	15		Persentase masyarakat tangguh bencana	5%							
				4	5	1	15	1	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	1 dokumen	130,625,000.00	130,625,000.00	-	TETAP	Jawa Timur - Kota Malang	-
				4	5	1	15	2	Penyebarnya informasi dan potensi bencana	Jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi/pawai pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	2 kali	95,985,000.00	97,535,000.00	1,550,000.00	BERTAMBAH	Jawa Timur - Kota Malang	Penambahan honor dan belanja perangko
				4	5	1	15	3	Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	60 kali	154,580,000.00	147,255,000.00	(7,325,000.00)	BERKURANG	Jawa Timur - Kota Malang	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR

				4	5	1	15	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah pelaksanaan sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	2 kali	128,855,000.00	124,875,000.00	(3,980,000.00)	BERKURANG	Jawa Timur - Kota Malang	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR
				4	5	1	15	5	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	5 Kelurahan	1,070,610,000.00	881,560,000.00	(189,050,000.00)	BERKURANG	Jawa Timur - Kota Malang	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR
Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu handal dan melayani	"Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi "	Jumlah korban bencana yang berhasil dievakuasi dibagi jumlah korban bencana yang harus dievakuasi dikali 100%	100%	4	5	1	16		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana			1,747,020,000.00	1,650,381,000.00	(96,639,000.00)			
	"Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik "	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan logistik dibagi jumlah seluruh korban bencana dikali 100%	100%									-	-				
	"Rata - rata waktu tanggap (respond time) bencana "	Jumlah respond time seluruh kejadian bencana dibagi jumlah kejadian bencana	< 1 jam									-	-				
				4	5	1	16			Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	-	-	-			
				4	5	1	16	1	Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah diklat penanggulangan bencana bagi TRC / Relawan yang dilaksanakan	7 kali	403,955,000.00	394,855,000.00	(9,100,000.00)	BERKURANG	Jawa Timur - Jawa Timur	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR
										Jumlah diklat penanggulangan bencana bagi TRC / Relawan yang dilaksanakan	7 kali	-	-	-		Jawa Timur - Kota Malang	-
				4	5	1	16	2	Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	17 orang TRC, 8 orang operator Pusdalops, 4 orang TRC Kaji Cepat	698,930,000.00	697,310,000.00	(1,620,000.00)	BERKURANG	Jawa Timur - Kota Malang	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR
				4	5	1	16	3	Penyediaan dan prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	2 jenis	40,790,000.00	115,206,000.00	74,416,000.00	BERTAMBAH	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	16	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah pelaksanaan latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	1 kali	75,000,000.00	75,000,000.00	-	TETAP	Jawa Timur - Kota Malang	-

				4	5	1	16	5	Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	1 paket bahan bangunan, 150 paket sembako, 85 paket family kit, 1 paket sparepart peralatan, 1 paket pemeliharaan peralatan kebencanaan, 2 jenis belanja modal	359,915,000.00	199,580,000.00	(160,335,000.00)	BERKURANG	Jawa Timur - Kota Malang	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang RR		
				4	5	1	16	6	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	1 paket pemulihan jaringan sarana prasarana dalam darurat bencana	168,430,000.00	168,430,000.00	-	TETAP	Jawa Timur - Kota Malang	-		
Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	"Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik "	Jumlah korban bencana yang mendapat pemberdayaan dibagi jumlah seluruh korban bencana dikali 100%	50%	4	5	1	17		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			1,576,377,000.00	2,371,645,790.00	795,268,790.00					
	"Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana "	Jumlah sarana prasarana publik yang direhabilitasi dibagi jumlah sarana prasarana publik yang rusak pasca bencana dikali 100%	25%										-						
	"Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana "	Jumlah sarana prasarana publik yang direkonstruksi dibagi jumlah sarana prasarana publik yang rusak pasca bencana dikali 100%	25%											-					
					4	5	1	17			Persentase terjaminnya kualitas hidup masyarakat pascabencana	100%							
					4	5	1	17		1	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun	1 dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	-	TETAP	Jawa Timur - Kota Malang	-
					4	5	1	17		2	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	4 pekerjaan fisik	343,758,000.00	444,608,000.00	100,850,000.00	BERTAMBAH	Jawa Timur - Kota Malang	Penambahan Anggaran untuk rehabilitasi sarana prasarana fisik, honor PNS dan Honor Tenaga Ahli, Juru Gambar dan Surveyor
				4	5	1	17	3	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana	6 pekerjaan fisik	826,224,000.00	1,520,642,790.00	694,418,790.00	BERTAMBAH	Jawa Timur - Kota Malang	Penambahan Anggaran untuk rekonstruksi sarana prasarana fisik.		

									Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	-									
Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiakpsiagaan unsur - unsur penanggulangan bencana	"Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang " "Persentase menurunnya kejadian bencana " Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan untuk menjadi kelurahan tangguh Jumlah bencana tahun (x) dikurang jumlah bencana tahun (x - 1) dibagi jumlah bencana tahun (x - 1) dikali 100% IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	5	5	xx	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		409,500,000.00	390,020,000.00	(19,480,000.00)							
			kelurahan																	
			5%																	
			76%																	
				5	xx	1	6				Hasil evaluasi SAKIP SKPD	76	-							
				5	xx	1	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 jenis dokumen	66,000,000.00	61,620,000.00	(4,380,000.00)	BERKURANG	Jawa Timur - Jalan Danau Ranau Raya 1A Sawojajar Kota Malang	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang		
				5	xx	1	6	2		Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	2 jenis dokumen	102,500,000.00	105,900,000.00	3,400,000.00	BERTAMBAH	Jawa Timur - Jalan Danau Ranau Raya 1A Sawojajar Kota Malang	Perubahan SBPU tentang Honor bendaharan barang		
				5	xx	1	6	11		Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra yang disusun/direviu	1 draft Renstra	75,000,000.00	75,000,000.00	-	TETAP	Jawa Timur - Jalan Danau Ranau Raya 1A Sawojajar Kota Malang	-		
				5	xx	1	6	14		Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	jumlah NA dan Ranperda/Ranperwal	1 dokumen perwal	55,000,000.00	47,500,000.00	(7,500,000.00)	BERKURANG	Jawa Timur - Kota Malang	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang		
	5	xx	1	6	16		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	12 bulan	111,000,000.00	100,000,000.00	(11,000,000.00)	BERKURANG	Jawa Timur - Kota Malang	Pengurangan anggaran untuk digeser ke kegiatan Bidang					
	5	xx	1	6				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	0	-										
								Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	0	-										

BAB IV PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Kode Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program dan kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan RPJMD Kota Malang;
- d. Program dan kegiatan yang merupakan usulan langsung dan berasal dari masyarakat (bottom up) maupun dari stakeholder terkait dan diupayakan dapat baik yang melekat pada anggaran BPBD maupun pada masing-masing dinas/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 KAJIDAH-KAJIDAH PELAKSANAAN

Oleh karena RPJMD Kota Malang merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD merupakan visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih yang berisikan rencana dan agenda-agenda pembangunan jangka menengah atau selama periode 5 (lima) tahun. Dalam rangka mengaktualisasikan perencanaan dalam RPJMD tersebut menjadi suatu dokumen perencanaan tahunan berupa penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan

perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan, maka Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Seluruh Perangkat Daerah Kota Malang berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kota Malang. Sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis Kabupaten sebagaimana yang dirumuskan dalam RPJMD;
3. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya akan berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Malang adalah sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Kota Malang, maka Perangkat sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing;
5. Perangkat Daerah merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD berdasarkan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah setiap tahunnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan selanjutnya.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah;

2. Meningkatkan/optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;
3. Meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat, ormas, lembaga usaha (swasta) dan lembaga non pemerintah termasuk perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuhkembangkan masyarakat yang tanggap, tangkas, tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang ada, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai koordinator, motivator dan fasilitator;
4. Peningkatan penguatan kapasitas masyarakat khususnya yang berada pada wilayah/ daerah rawan dan berpotensi bencana, sehingga menjadi masyarakat yang semakin tanggap, tangkas dan tangguh dalam menghadapi dan menangani bencana, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan segala kemampuan/daya upaya yang ada, baik kapasitas SDM, kelengkapan dan ketersediaan sarana prasarana serta adanya dukungan dana dan partisipasi semua pihak terkait kebencanaan (LSM/ Ormas/ Lembaga Usaha) pada semua tahapan penanggulangan bencana.